

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Kecil Menengah (UKM) telah memberikan kontribusi yang penting dan besar dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat Indonesia karena itu, pemberdayaan dan pengembangan yang berkelanjutan perlu dilakukan terhadapnya agar UKM tidak hanya tumbuh dalam jumlah tetapi juga berkembang dalam kualitas dan daya saing produknya. Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) menjadi sangat strategis, karena potensinya yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat, dan sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Eksistensi dan peran UKM telah terbukti tahan terhadap krisis ekonomi pada tahun 1998, hanya sektor UKM yang mampu bertahan sementara usaha-usaha besar banyak yang gulung tikar karena terkena krisis moneter. Pentingnya UKM di negara-negara berkembang dapat mengatasi berbagai masalah ekonomi maupun sosial seperti mengurangi pengangguran, pemberantasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan.

Jumlah perusahaan UKM yang ada di Indonesia sekitar 95 persen, dengan menyerap tenaga kerja lebih dari 95 persen. UKM dalam tata perekonomian nasional sudah tidak diragukan lagi, dengan melihat kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja, pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional, nilai ekspor nasional, dan investasi nasional. Dalam berita statistik menyebutkan, peran UKM terhadap penciptaan PDB nasional menurut harga

berlaku tercatat sebesar Rp. 1.786,22 triliun atau 53,49 persen, kontribusi usaha kecil (UK) tercatat sebesar Rp. 1253,36 triliun atau 37,53 persen dan usaha mikro (UM) sebesar Rp. 532,86 triliun atau 15,96 persen dari total PDB nasional, selebihnya adalah usaha besar (UB) yaitu Rp. 1.553,26 triliun atau 46,51 persen. PDB (Produk Domestik Bruto) nasional setiap tahunnya mengalami perkembangan sebesar Rp. 335,09 triliun atau 18,76 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kontribusi UK tercatat sebesar Rp.1.496,25 triliun atau 37,81 persen dan UM sebesar Rp. 625,06 triliun atau 15,79 persen, selebihnya sebesar Rp. 1.836,09 triliun atau 46,40 persen merupakan kontribusi UB (Kristanto,2011).

Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Statistik mengatakan bahwa upaya pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari tahun ke tahun selalu dimonitor dan dievaluasi perkembangannya baik dalam hal kontribusinya terhadap penciptaan produk domestic bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, ekspor dan perkembangan pelaku usahanya serta keberadaan investasi usaha kecil dan menengah melalui pembentukan modal tetap bruto (investasi). Keseluruhan indicator ekonomi makro di atas selalu dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan UKM serta menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

Perkembangan sektor UKM yang demikian menyiratkan bahwa terdapat potensi yang besar jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik tentu akan dapat mewujudkan usaha menengah yang tangguh. Sementara itu, disisi yang lain UKM juga masih diharapkan pada masalah yang terletak pada proses

administrasi. Pemerintah sudah mencoba membantu mengatasi kendala yang dihadapi oleh sebagian besar UKM, seperti melakukan pembinaan dan pemberian kredit lunak. Namun muncul permasalahan baru, para pelaku UKM diharapkan menyertakan laporan keuangan sebagai syarat mengajukan pinjaman kepada pihak bank. Karena dari pihak perbankan sendiri tidak ingin mengambil resiko dalam penyaluran kredit bagi UKM lantaran perbankan tidak mengetahui perkembangan usaha tersebut. Sementara hampir semua UKM tidak memiliki laporan kinerja usaha dan laporan keuangan dengan penerapan akuntansi pada UKM masih sangat terbatas. Hal ini terjadikarena UKM tidak dibiasakan untuk melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sebagai gambaran kegiatan usaha dan posisi keuangan perusahaan.

Kebanyakan dari UKM hanya mencatat jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan, jumlah barang yang dibeli dan dijual, dan jumlah piutang atau utang. Namun pencatatan itu hanya sebatas pengingat saja dan tidak sebagai format yang diinginkan oleh pihak perbankan. Meskipun tidak dapat dipungkiri mereka dapat mengetahui jumlah modal akhir mereka setiap tahun yang hampir sama jumlahnya jika kita mencatat dengan sistem akuntansi. Penyusunan laporan keuangan yang merupakan tahap awal dari penerapan akuntansi akan menghasilkan informasi yang mempunyai peranan penting, baik untuk penyusunan perencanaan, pengendalian, maupun untuk pengambilan keputusan keuangan. Berbagai penelitian telah menyimpulkan bahwa penggunaan informasi akuntansi dalam menjalankan aktivitas operasional akan mempengaruhi kesuksesan dari perusahaan. Laporan keuangan menjadi salah satu komponen yang mutlak harus

dimiliki oleh UKM jika mereka ingin mengembangkan usaha dengan mengajukan modal kepada para kreditur yang dalam hal ini adalah pihak perbankan. Untuk itu, kebiasaan untuk mencatat setiap kegiatan usaha yang terjadi dan menyusun laporan keuangan harus ditumbuhkan di kalangan UKM.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi keuangan merupakan usaha dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya. Pemenuhan tujuan laporan keuangan akan bermanfaat dan akan memenuhi tujuan jika memenuhi empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*). Informasi dapat dipahami bilamana pengguna dapat memahami laporan keuangan yang disajikan.

Adanya laporan keuangan membuat pihak luar dapat menganalisis kelayakan pemberian kredit atas permohonan yang diajukan. Laporan yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya akan sangat membantu proses evaluasi kelayakan kredit. Namun sebagian besar UKM belum mampu menyediakan informasi keuangan dengan benar dan teratur sehingga mereka mengalami kendala dalam mengajukan kredit pada lembaga formal seperti pihak perbankan.

Untuk mempermudah UMKM dalam penyusunan laporan keuangan maka pada tahun 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) – Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah mengesahkan SAK ETAP dan standar ini berlaku efektif per 1 Januari 2011. Entitas yang dapat menggunakan standar ini yakni entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu entitas yang tidak memiliki

akuntabilitas publik yang signifikan serta entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Dengan adanya SAK ETAP ini kedepannya tentu sangat diharapkan UKM mampu melakukan pembukuan akuntansi untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih informative dengan tujuan tentunya memberikan kemudahan bagi investor maupun kreditor untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi para pengusaha UKM.

Di dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan PSAK dengan pelaporan keuangan yang lebih kompleks. Sesuai dengan ruang lingkup SAK ETAP maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditor, dan lembaga pemeringkat kredit.

Setiap pihak sudah semestinya menyadari pentingnya akuntansi dalam sebuah bisnis, tetapi UKM di Indonesia belum secara baik mengimplementasikannya, sehingga UKM tidak dapat mengetahui prestasi kerja dan kesulitan dalam pengajuan kredit ke lembaga formal. PSAK umum yang terlalu rumit untuk usaha sektor kecil ialah salah satu penyebab pelaku UKM enggan membuat laporan keuangan. SAK ETAP ini akan membantu perusahaan kecil menengah dalam menyediakan laporan keuangan yang tetap relevan dan andal.

Adanya SAK ETAP dengan prinsip kesederhanaan dapat memberikan kemudahan UKM dalam menyajikan laporan keuangan. Standar ETAP diharapkan memberikan kebebasan berbisnis, kebebasan berinvestasi dan membangun ekonomi kerakyatan berbasis UKM bagi Indonesia. Dengan aplikasi SAK ETAP dalam dunia UKM membuat tumbuh suburnya UKM dan mampu membantu UKM agar dapat lebih berkembang. Selain itu SAK ETAP juga memberi kemudahan untuk UKM dibandingkan dengan PSAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Kemudian manfaat tidak langsung yang membedakan pencatatan atau pembukuan biasa dengan pencatatan menggunakan sistem akuntansi (SAK ETAP) adalah membentuk mindset kepada pengusaha untuk lebih bertanggung jawab atas pengelolaan usaha yang dilakukannya. Namun pada kenyataannya SAK ETAP belum banyak diterapkan pada pelaku UKM dalam menyusun laporan keuangan di Indonesia khususnya yang ada di kota Pontianak.

Adapun objek penelitian ini ialah toko pakaian Boutique Save Fashion, bidang usaha ini berbentuk dagang yang menjual pakaian wanita. Pada UKM Boutique Save Fashion ini belum sepenuhnya menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP, mereka hanya membuat catatan pembelian dan penjualan yang sangat sederhana, mereka juga tidak membuat neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta tanpa adanya catatan atas laporan keuangan.

Hal ini tidak sesuai dengan standar SAK ETAP yang berlaku. Komponen laporan keuangan entitas dalam SAK ETAP (2009:3.12) meliputi :

1. Neraca Neraca
2. Laporan laba rugi Laporan laba rugi
3. Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan :
 - a. Seluruh perubahan ekuitas, atau
 - b. Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi.

Dengan menggunakan SAK ETAP, UKM Boutique Save Fashion dapat membuat laporan keuangan dengan benar, tentunya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga usaha butik yang mereka jalani dapat lebih profesional dalam hal laporan keuangan dan dapat mempermudah dalam hal peminjaman dana kepada pihak bank untuk menambah modal usaha, tentunya untuk memajukan usaha tersebut. (Muhammad,2014)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN UNTUK ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK-ETAP) PADA USAHA KECIL MENENGAH (UKM) BOUTIQUE SAVE FASHION”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) pada UKM Boutique Save Fashion ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) pada UKM Boutique Save Fashion ?

1.3 Batasan Masalah

Ruang lingkup yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah penelitian hanya pada permasalahan mengenai penerapan SAK-ETAP pada UKM Boutique Save Fashion.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) pada UKM Boutique Save Fashion.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) pada UKM Boutique Save Fashion.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi :

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu sarana pembelajaran bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan dibidang penelitian ilmiah dalam mengungkap permasalahan tertentu secara sistematis serta berusaha memecahkan permasalahan yang ada tersebut dengan metode ilmiah sehingga menunjang pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu akuntansi dan menjadi salah satu tambahan referensi bagi rekan mahasiswa dan pihak-pihak lain yang berminat dan ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

3. Bagi Pihak UMKM

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi UKM Boutique Save Fashion dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK-ETAP agar dapat menentukan kebijakan dalam melakukan usahanya diperiode berikutnya.